



POLITIK DAKWAH DI NUSANTARA (Tinjauan Historis Relasi Ulama dan Umara')

Asep Maskur

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, Indonesia

E-mail: asepmaskur28@gmail.com

Zenal Arifin

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, Indonesia

E-mail: zenal_arifin@gmail.com

Mastori

STAI PTDII Jakarta, Indonesia

E-mail : mastori87@gmail.com

Diterimatanggal:03 Meret 2021

Selesai tanggal:30 November 2021

ABSTRACT

This study discusses the urgency of integration of ulama and umara in Indonesia by taking samples of three major archipelago ulama, namely NurudinArRaniri, SunanGiri and SunanKalijaga. The fundamental problem of this research is how the historical portrait and its current implementation are related to the integration of ulama and umara 'in formulating policies that benefit the interests of Islamic da'wah in particular and Islamic civilization in general. The method used in this research is descriptive qualitative with a historical approach. The results of this study indicate that scholars and umara 'in the history of past Islamic kingdoms in the archipelago were very strong collaborations. Umara policy 'cannot be separated from the thinking or ijtihad of the ulama'. Therefore, the research results should be used as a model for the integration of ulama and umara today in Indonesia.

[Studi ini membahas tentang urgensi integrasi ulama dan umara di Indonesia dengan mengambil sample tiga ulama besar nusantara yaitu Nurudin Ar Raniri, Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Persoalan mendasar penelitian ini adalah bagaimana potret historis dan implementasinya saat ini terkait integrasi ulama dan umara' dalam merumuskan kebijakan yang menguntungkan kepentingan dakwah Islam secara khusus dan peradaban Islam secara umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ulama dan umara' dalam sejarah kerajaan Islam masa lalu di Nusantara adalah terjadi kolaborasi yang sangat kuat. Kebijakan umara' tidak lepas dari hasil pemikiran atau ijtihad ulama'. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini seyogyanya dapat dijadikan sebagai role model bagi integrasi ulama dan umara saat ini di Indonesia].

Kata Kunci: *Ulama; Dakwah; Umara'.*

PENDAHULUAN

Relasi dan integrasi ulama dan umara di Indonesia kembali menjadi

perbincangan. Pasalnya, situasi politik yang cenderung kurang berpihak pada kepentingan masyarakat terutama

umat Islam kembali terjadi terutama pasca munculnya wacana sertifikasi da'i, pembubaran ormas Islam dan persekusi kegiatan dakwah diberbagai tempat. Persinggungan tersebut penting diurai secara detail untuk menghasilkan paradigma baru atau paradgima lama yang masih relevan untuk dipertahankan bahkan dikembangkan terkait wacana integrasi ulama dan umara'.

Ulama dan umara' memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan masyarakat muslim. Keberadaan mereka sangat dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui ilmu agama yang dimiliki para ulama, masyarakat akan terbimbing dalam kebaikan. Sementara dengan wewenang yang dimiliki, umara dapat membuat kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun religiusitas. Oleh sebab itu, integrasi antara ilmu ulama dan umara' senantiasa relevan sepanjang zaman.

Fungsi utama ulama adalah mendidik umat agar hidup sesuai dengan aturan syara' (syariah Allah) agar senantiasa mengabdikan kepada Allah sekaligus persiapan bekal untuk kehidupan akhirat (Basri, 2013). Karena peran inilah ilmu ulama sangat dibutuhkan masyarakat bukan harta yang mereka miliki atau yang lainnya. Fungsi ini tergambar pada kisah

menjelang wafatnya Muadz bin Jabal yang ditangisi oleh para murid beliau. Maka Muadz pun bertanya apa gerangan yang membuat mereka menangis. Maka para murid pun menjawab "*demi Allah, kami tidak menangisi harta yang kami dapatkan dari engkau tapi kami menangisi ilmu dan iman yang akan hilang dari kami dengan wafatmu*" (Basri, 2013). Sebuah jawaban yang bermuara dari kedalaman hati dan pemahaman yang jernih tentang peran penting ulama ditengah kehidupan para sahabat.

Peran strategis yang diduduki oleh para ulama tergambar sangat jelas dari sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh imam Bukhari bahwa ketika Allah akan mencabut ilmu dari manusia maka akan diwafatkan para ulama. Ketika ulama banyak yang wafat maka umat akan kehilangan sosok tempat bertanya. Akhirnya mereka bertanya pada orang-orang bodoh yang menjawab pertanyaan manusia tanpa landasan ilmu. Akhirnya jawaban itu menjadi sesat dan menyesatkan (Tim Dakwah, 2015). Dengan demikian, menjadi kewajiban umat agar senantiasa menjaga ulama dari berbagai macam marabahaya.

Pada dasarnya, ulama memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari siapapun di tengah masyarakat berkat ilmu agama yang mereka miliki, termasuk

dibandingkan kedudukan penguasa atau *umara'* (Raharja, 2002).Sebab *umara'* dalam Islam justru membutuhkan ilmu ulama untuk membuat atau menetapkan kebijakan-kebijakan.

Keulamaan seseorang tidak lahir dari pengakuan *umara'* namun dari kapasitas dirinya yang diakui oleh guru dan murid-muridnya sehingga diberi kepercayaan untuk mengajarkan kembali ilmunya dan diakui pula oleh ulama yang lain. Sebagai salah satu bagian dari Nusantara, Aceh memiliki sejarah Islam yang panjang tentang mitra strategis antara ulama dan *umara'*. Pada masa kerajaan Islam ulama ditempatkan sebagai mitra *umara* dan memiliki kedudukan terhormat dalam kultur dan struktur masyarakat Aceh. Karena itu, keduanya beraktifitas secara bersamaan dalam memberikan kontribusi dan pelayanan terhadap masyarakat (Gozali, 2016).

Secara historis, walaupun kedudukan ulama terkadang secara struktural ada dibawah *umara'* namun secara fungsional tidaklah demikian.Ulama lahir dan besar dalam tradisi keilmuan yang kokoh.Ketokohan ulama tidak lahir dari pengakuan atau sertifikasi dari *umara'*.Karena sertifikasi merupakan pertanda bahwa ulama berada dibawah *umara'*. Keulamaan seseorang akan 'tersertifikasi' secara alamiah oleh ulama lainnya dan umat. Ulama yang tidak

berintegritas baik dari sisi ilmu maupun pribadinya secara otomatis akan tersingkir dari kehidupan masyarakat.

Lebih dari itu, ulama merupakan penjaga gawang moralitas umat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya *umara'* dan politik agar kekuasaan selaras dengan nilai-nilai Islam.Maka sebuah paradigma terbalik bila penjaga gawang itu justru didikte oleh kekuasaan yang memiliki kecenderungan menyimpang.Disinilah Islam menetapkan rambu-rambu bagaimana seharusnya integrasi antara *umara* dan ulama itu dijalankan sehingga fungsi-fungsi kebaikan dapat dijalankan oleh kedua belah pihak.

Dewasa ini kita dihadapkan pada persoalan minimnya pelibatan ulama dalam pengambilan kebijakan politik. Ulama sering hanya dijadikan sebagai stempel kebijakan para pejabat sesuai dengan kepentingan mereka.Misalnya, ketika angka golput tinggi maka ulama diminta untuk memfatwakan keharaman golput. Sementara itu, ulama tidak dilibatkan dalam proses legislasi penting lainnya yang diharapkan dapat menghasilkan produk perundang-undangan yang berkualitas dan sejalan dengan nilai spriritualitas mayoritas masyarakat negeri ini. Karena itu, studi ini penting dilakukan untuk memotret sebagian peran ulama dalam mengimplementasikan hasil

ijtihadnya dalam ranah kekuasaan terutama pada masa kerajaan Islam masa lalu.

Hasil kajian terhadap relasi atau integrasi ulama dan umara' pada masa lalu inilah yang diharapkan dapat diambil nilai-nilai positifnya untuk diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat muslim saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis. Sumber data yang digunakan adalah berbagai literatur atau dokumen yang membahas objek penelitian terutama sejarah dakwah di Nusantara khususnya pada masa beberapa ulama yang menjadi fokus penelitian ini yaitu masa Nurudin ar Raniry, Sunan Kalijaga dan Sunan Giri.

PEMBAHASAN

Kedudukan Ulama dan Sifat-Sifatnya

Secara etimologi, ulama terambil dari bahasa Arab yaitu dari kata '*alim*'. Secara harfiah memiliki arti orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Antonim dari *ilmu* (ilmu) adalah *jahil* atau bodoh. Pada masa awal-awal Islam, ulama identik dengan orang yang memahami ilmu-ilmu agama secara baik dan luas (Qardhawi, 1417 H). Di Indonesia, ada beragam sebutan yang disematkan pada orang yang

memiliki karakteristik sebagai ulama. Setiap daerah memiliki sebutan yang berbeda. Misalnya di Aceh disebut *Tengku*, di Sumatera Barat disebut Buya atau tuanku. Di Jawa Barat disebut Ajengan. Di Jawa disebut kyai dan di Nusa Tenggara disebut tuan guru (Tim Penyusun, 2003). Sebutan khusus yang disematkan masyarakat terhadap ulama merupakan petunjuk bahwa para ulama memiliki kedudukan yang istimewa di tengah masyarakat. Keistimewaan ini bahkan dilegitimasi oleh Allah dan Rasulnya melalui beberapa ayat dan hadits Nabi.

Secara terminologi, definisi ulama telah dikemukakan oleh para ahli. Akan tetapi, dari berbagai definisi yang ada belum ditemukan definisi yang memuaskan dan memenuhi seluruh unsur yang menjadi sub atau bagiannya (*jami'*) dan belum pula menjelaskan unsur yang tidak menjadi bagiannya (*mani'*) (Wahidin, 2012). Secara umum, dapat dikatakan bahwa ciri utama ulama terletak pada penguasaannya pada ilmu agama yang luas sehingga kepribadiannya mencerminkan dari ilmu syar'i yang dimilikinya yaitu mengamalkan ilmu dan memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah SWT.

Makna ini setidaknya dapat disarikan dari berbagai definisi ulama yang dikemukakan oleh para ahli. Dari berbagai

definisi yang dikemukakan para ahli dapat dikeumkakan bahwa ulama adalah orang yang dengan perantaraan ilmu yang dimiliki menghasilkan rasa takut kepada Allah. Para ulama mewarisi ilmu para Nabi sehingga siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut maka ia telah mengambil bagiannya secara sempurna sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Darda (Dawud, 1998).

Menurut Imam Ghazali, secara jelas kedudukan ulama yang tinggi dan mulia disebutkan dalam al-Qur'an (Ghazali, 2011). Dalam QS Al Mujadalah ayat 11, dijelaskan bahwa kedudukan ulama demikian tinggi derajat mereka sehingga kedudukan itu wajib diketahui oleh setiap orang selain mereka agar mengetahui kedudukan itu dan menjaganya (Arnawati, 2014). Sebagaimana beragamnya sebutan untuk ulama di Indonesia, cara mengekspresikan kemuliaan ulama di Indonesia pun beragam. Misalnya menundukan kepala ketika lewat dihadapan ulama, mencium tangan ulama bahkan ada yang sampai minum bekas kopi ulama karena diyakini mengandung berkah.

Kemuliaan ulama yang lain terletak pada amanah yang diembannya yakni sebagai penerus para nabi dalam menyebarkan ilmu dan menjaga agama dari kesesatan dan penyesatan. Tugas-tugas itu antara lain :*pertama*,

menyampaikan ajaran Islam sesuai perintah Allah.*Kedua*, menjelaskan ajaran Allah sesuai perintah Al-Qur'an.*Ketiga*, memutuskan perkara.*Keempat*, memberikan contoh pengamalan (Shihab, 1994).*Keempat* tugas ini secara otomatis melekat langsung pada diri ulama' sehingga ulama yang tidak menjalankan tugas ini dengan ikhlas maka sejatinya ulama tersebut telah mengkhianati tugas yang diembankan padanya.

Dengan segenap kemuliaan yang dimilikinya, maka para ulama dapat diibaratkan seperti kumpulan bintang yang memiliki berbagai sifat yang melekat pada diri ulama, yaitu :*pertama*, memiliki sikap *wara'* yaitu menjaga diri perbuatan dosa. *Kedua*, memiliki komitmen serta keberanian dalam menyampaikan kebenaran, apapun resikonya.*Ketiga*, memiliki rasa belas kasih dan cinta pada sesama muslim dan mudah memaafkan. *Keempat*, menjauhi sifat oportunistis dan penjiilat. *Kelima*, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan seperti sholat, puasa dan baca al-Qur'an.*Kelima*, memiliki sikap sungguh-sungguh dalam menggali ilmu agama sehingga dapat merinci dalil-dalilnya (Bajuri, 2019).

Dengan segala idealisme yang dimiliki seorang ulama maka tidak berlebihan bila kiranya ulama diberikan otoritas untuk menggali hukum-hukum

syara' agar tercipta tatananan hukum yang berkeadaban dan berkeadilan. Di sisi lain, kemuliaan dan kedudukan ulama harus disadari betul oleh para ulama sendiri sehingga dengan kesadaran itu ulama tidak merendahkan dirinya dihadapan siapapun. Termasuk dihadapan umara'.

Karakter ulama dihadapan penguasa haruslah tegas berpihak kepada kebenaran. Untuk itu, Fethullah Gulen menyarankan agar seorang ulama hendaknya tidak mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan penguasa dan konglomerat di luar tugasnya untuk menyampaikan Amar ma'ruf nahi munkar. Sebab Rasulullah SAW bersabda *'seburuk-buruk umatku adalah para ulama yang suka mendatangi para penguasa sebaliknya sebaik-baik para penguasa adalah mereka yang suka mendatangi kaum ulama'*. (Gulen, 2011). Relasi yang ada antara ulama dan umara sebatas pada dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar sehingga ulama tidak terjebak pada jerat-jerat kepentingan duniawi yang membuat lidahnya kelu untuk menyatakan kebenaran.

Ulama memiliki peran yang strategis di tengah masyarakat. kharisma dan ilmu yang dimiliki ulama mampu menarik simpati jutaan umat. Itulah sebabnya ulama menjadi pihak yang dianggap penting oleh umara'. Tidak

jarang umara yang akan membuat kebijakan menjadikan fatwa ulama sebagai pertimbangan. Dalam menyikapi pandemi covid 19 tahun 2020, misalnya, MUI kota Jambi menghimbau masyarakat untuk mematuhi instruksi pemerintah soal ibadah ramadhan (metrojambi.com, 2020). Imbauan ini penting karena MUI secara kultural suaranya kadang lebih didengar umat ketimbang umara'. Contoh lain, untuk mengurangi angka golput setiap diadakannya pesta demokrasi, baik daerah maupun pusat, MUI membantu umara' untuk mengeluarkan fatwa keharaman golput sebagaimana fatwa yang disampaikan MUI DIY, Ahmad Muhsin. Memilih pemimpin hukumnya wajib sehingga golput hukumnya haram (detik.com, 2020). Akan tetapi, sebagai sebuah fatwa yang tidak mengikat, fatwa tersebut ditengah masyarakat menuai pro dan kontra. Alhasil, beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa fatwa ulama diperlukan untuk memuluskan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya kebijakan yang memerlukan dukungan publik atau masyarakat muslim.

Ulama tidak dapat berdiri sendiri untuk merealisasikan kebaikan yang ada di tengah masyarakat. Mereka memerlukan kekuatan lain agar hasil *istinbath* hukumnya dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Kekuatan itu tidak lain adalah umara'. Umara' dalam bahasa al-Qur'an disebut ulil amri yaitu orang yang memegang kekuasaan, dapat mengambil keputusan dan yang menangani berbagai persoalan (Chirzin, 2020).

Tugas umara yang utama, menurut Imam Mawardi adalah (1) menjaga penerapan agama yang benar. (2) menerapkan hukum dalam setiap permasalahan dengan benar. (3) melindungi keamanan negara. (4) menegakan hukum pidana sehingga hak rakyat terlindungi (5) menjaga perbatasan negara dengan sistem keamanan yang baik (6) jihad memerangi musuh (7) mengambil pajak dan zakat sesuai syariat (8) memperkerjakan orang sesuai keahlian dan bidangnya, (9) mendistribusikan baitul mal, (10) memantau langsung perkembangan dan situasi masyarakat (Al Mawardi, 2014).

Fungsi ulama dan umara' diatas akan tampak jelas bahwa keduanya memerlukan sinergi dan integrasi agar menghasilkan kekuatan hebat dalam membentuk peradaban masyarakat yang adil, makmur dan sesuai dengan norma Islam.

Relasi Ulama dan Umara' Pada Masa Kerajaan Islam

Masa sejarah Islam yang panjang di Nusantara, relasi ulama dan umara'

terjadi secara dinamis. Ada ulama yang menjabat sebagai *qadhi*, menjadi oposisi dan bahkan penjilat (Hamka, 2013). Pada awal masa pra kolonial, peran ulama dibangun melalui institusi hukum yang berperan sebagai Qadhi. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga terpenting yang memberikan legitimasi bagi ulama untuk menegakan hukum Islam. Bahkan lembaga Qadhi ini semakin mapan pada abad ke 17 terutama di Kerajaan Islam Aceh dan Banten (Jajat, 2013). Posisi ini merupakan keniscayaan bagi suatu negara yang menjadikan Islam sebagai ideologi yang memberikan arah dalam pembangunan manusia seutuhnya.

Kedudukan ulama dalam sejarah dan sistem Islam tidak hanya berperan sebagai penceramah lepas. Ulama pada level tertentu dapat menduduki jabatan *qadhi* yang bertugas menggali hukum-hukum Islam yang akan dijadikan sebagai hukum negara. Dalam Islam dikenal bentuk pengadilan yaitu *khussumat, hisbah dan Madzalim*. Namun ketiga jenis bentuk pengadilan ini tidak bisa saling menegasikan satu keputusan dengan keputusan yang lain sebagaimana pengadilan yang tidak memberlakukan sistem Islam. Sebab hukum yang jadi rujukan hanya satu yaitu sumber hukum Islam (Hafidz, 2016). Karena itu, posisi ini harus ditempati oleh ulama yang mumpuni

ilmu dan reputasinya hingga sampai pada level mujtahid.

Sejarah Islam mencatat ada banyak ulama besar yang bukan hanya berperan sebagai pemberi fatwa dan pengajar agama ditengah masyarakat namun duduk menjadi bagian dari pemerintahan yang secara praktis melaksanakan ijtihadnya dalam ranah politik dan hukum berdasarkan syariat Islam. Diantara mereka ada yang hidup di Nusantara pra kolonial maupun masa kejayaan Islam secara umum. Ulama besar tersebut tersebar di kerajaan Islam di Jawa dan luar Jawa yang sebagian terkenal menjadi bagian dari Walisongo. Walisongo bukanlah lembaga yang terbentuk secara informal dan lokal namun merupakan lembaga dakwah yang sengaja dibentuk oleh Sultan Turki Utsmani yaitu Muhammad I yang berkuasa tahun 1394 M. Pembentukan lembaga itu diawali oleh sebuah laporan dari para pedagang Gujarat (India) bahwa pemeluk Islam di pulau Jawa masih sedikit (Simom, 2007).

Atas dasar itu, Sultan Muhammad I sebagai umara' atau khalifah Islam mengumpulkan dan memilih orang-orang yang memiliki pengetahuan agama (ulama) guna menjalankan misi dakwah tersebut. Pertama kali yang Sultan lakukan adalah dengan mengirim surat pada pejabat dan pembesar di Timur Tengah

dan Afrika Utara agar mereka mengirimkan ulama yang memiliki karomah. Akhirnya, dibentuklah tim sembilan yang ditugaskan sebagai pendakwah di pulau Jawa. Tim itu berangkat pada tahun 1404 M yang diketuai oleh syekh Maulana Malik Ibrahim, ulama Turki. Selain dikenal sebagai ahli agama, beliau juga dikenal ahli irigasi dan mampu mengatur negara (Simom, 2007). Dengan demikian, walisongo merupakan istilah politik yang dibentuk oleh dewan ulama di tanah Jawa untuk menyelamatkan dakwah Islam akibat serangan kediri ke Majapahit (Wahyudi, 2005).

Sebagian dari kiprah dan kerja sama dakwah antara ulama dan umara ini seyogyanya dapat diambil sebagai pelajaran bagi umat Islam di era saat ini sebagai *role model* dalam menjalankan aktifitas dakwah dan politik sekaligus. Tentu saja dengan menyesuaikan perkembangan situasi sosial dan politik yang ada. Diantara para ulama Nusantara tersebut adalah:

1. Nurudin Ar Raniri

Pada awal masa perkembangan Islam di Nusantara, peranan ulama timur tengah terhadap perkembangan Islam awal di Nusantara sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa persentuhan pemikiran, peradaban dan

budaya dari luar tidak selalu berdampak buruk. Salah satu ulama luar nusantara yang ikut memberikan kontribusi bagi perkembangan Islam di Nusantara terutama Aceh adalah Syekh Nurudin Ar Raniri. Nama lengkap beliau adalah Nurudin Muhamad bin Ali Hasanji bin Muhamad Hamid ar Raniri al Quraisy as Syafi'i. Menurut berbagai sumber, Nuruddin Ar-Raniry bukan merupakan orang asli Nusantara. Beliau berasal dari Gujarat (India) keturunan Arab (Solihin, 2005) yang tinggal di Nusantara yaitu Aceh. Dia sangat berperan dalam perkembangan faham tasawuf pada sekitar abad 17 (Madjid, 2015).

Menurut catatan sejarah, Nurudin dua kali singgah ke Aceh. *Pertama*, dilakukan pada masa Sultan Iskandar Muda sebelum tahun 1637. Namun demikian, kedatangannya tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Sultan Iskandar yang menganut ajaran wujudiyah. Sementara Ar Raniry sendiri menganut faham *rifa'iyah*. *Kedua*, setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda dan Syekh Samsudin, Ar Raniry kembali ke Aceh dan berhasil mendapatkan posisi terhormat dari Raja Iskandar Tsani, menantu Sutan Iskandar Muda. Kiprah Ar Raniri semakin nyata di Aceh terutama ketika diangkat menjadi mufti

menggantikan mufti sebelumnya yaitu Samsudin as Sumatrani (Madjid, 2015).

Pada masa itulah Ar Raniri dikenal luas sebagai orang yang alim, mufti sekaligus penulis yang produktif selama tujuh tahun di kerajaan Aceh. Selain itu, ia juga dikenal sebagai tokoh yang menentang doktrin wujudiyah yang dikembangkan oleh ulama lain yaitu Hamzah Fansyuri dan Samsudin as Sumatrani (Madjid, 2015).

Pada masanya, doktrin *wujudiyah* Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani yang menjadi madzab sebelumnya 'dibersihkan' oleh Nurudin melalui dukungan kekuasaan (Musyafa, 2019). Selain itu, upaya ini pun didukung oleh Abdurrauf as Singkili yang menekankan pentingnya syariah dalam menempuh jalan tasawuf (Amin, 2014). Selain itu, menurut Musyafa, posisi penting yang diduduki Nurudin cukup memberikan pengaruh besar terhadap penyebaran dakwah Islam di tanah rencong tersebut. Sebab posisi beliau sebagai 'orang kedua' setelah Sultan Iskandar Tsani memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan warna dan corak kebijakan kerajaan Aceh. Posisinya yang kuat bahkan menyerupai seorang

perdana menteri. Sehingga paham wujudiyah yang dikembangkan sebelumnya oleh Hamzah Fansyuri dan Samsudin as Sumatrani kemudian ditumpas dan diganti dengan penyebaran paham syar'iyah (Musyafa, 2019).

Diantara tugas utamanya sebagai mufti adalah memberi nasihat atau masukan bagi Sultan Iskandar Tsani terutama dalam masalah agama dan politik. Apalagi, Sultan baru naik tahta sehingga membutuhkan pembimbing yang memiliki kredibilitas baik ilmu agama maupun manajemen kenegaraan. Salah satu nasehat Nurudin pada Sultan adalah mengingatkan tentang fungsi khalifah Tuhan di bumi yang akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah nanti. Karena itu, seyogyanya khalifah berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya terhadap rakyat sebagaimana tuntutan al-Qur'an. Mendengar nasehat-nasehat tersebut, akhirnya Sultan banyak menghapus hukum-hukum kerajaan yang tidak Islami seperti 'menjilat besi' dan 'mencelup minyak' (Musyafa, 2019).

Selain itu, Ar Raniry dikenal sebagai ulama yang keras dalam membantah pemikiran-pemikiran lain

yang tidak sependapat dengannya. Sehingga beliau dituduh sebagai ulama yang tidak menerima perbedaan pendapat. Segala argumen dan pemikiran dari rival ideologisnya dianggap tidak bernilai dan tak berharga. Hal ini tampak pada sikapnya yang menyebut bahwa semestinya pendapat-pendapat lawannya tersebut tidak keluar dari mulut manusia tetapi dari mulut anjing dan binatang bahkan vagina perempuan. Pendeknya, Ar Raniry tidak menyukai perbedaan interpretasi atau pendapat tentang suatu persoalan yang dianggap pokok (Zulhelmi, 2017).

Berbagai literatur menyebutkan bahwa Nurudin Araniry merupakan tokoh pembaharuan Islam di Aceh yang sebelumnya didominasi oleh paham wujudiyah masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang dianggapnya sesat. Pada awalnya, Ar Raniry hanya menyerukan kesesatan aliran wujudiyah yang dikembangkan oleh ulama sebelumnya yaitu Hamzah Fansyuri dan Syamsudin al Sumatrani. Namun setelah menjadi Hakim, dia menerukan untuk memburu pengikut aliran wujudiyah (Sangidu, 2003).

Dengan demikian, Ar Raniri sebagai ulama sekaligus orang penting

di pemerintahan memiliki peran yang sangat besar dan menjadi pelopor tegaknya syariat Islam di Kerajaan Aceh bersama para ulama lainnya. Selain itu, fakta historis ini menunjukkan bahwa jauh sebelum terbentuknya negara yang kemudian bernama Indonesia, syariat Islam sudah diberlakukan sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Untuk itu, Ar Raniri bersama rekan ulama lainnya seperti Abdur Rauf Singkil harus melakukan perjuangan yang tidak mudah untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang Islami. Bahkan beliau harus bersitegang dengan ulama lain penganut panteisme yang tidak sejalan dengan pemikiran ar Raniri (Musyafa, 2019).

Setelah lebih kurang tujuh tahun berkiprah ditengah masyarakat Aceh, akhirnya Nurudin ar Raniri kembali ke India dan wafat disana pada tanggal 21 September 1685 M atau bertepatan tanggal 22 Dzulhijjah 1096 H. Sebelum meninggal, ar Raniri menghasilkan karya intelektual berupa buku-buku yang tidak sedikit dari berbagai disiplin keilmuan seperti hadits, fikih, tafsir, akhlak, filsafat, perbandingan agama dan tasawuf (Musaffa, 2019). Seluruh karya-karya yang dihasilkannya menunjukkan kapasitas Ar Raniri sebagai ulama dan

pemikir Islam yang memiliki pengaruh besar di dunia Islam pada masa itu terutama di Nusantara.

2. Sunan Kalijaga

Sunan Kalijaga merupakan nama lain dari Raden Sahid yang merupakan putera Tumenggung Wilaktita yang menjabat sebagai bupati Tuban. Kakek sunan Kalijaga merupakan seorang ulama yang dalam kiprah dakwahnya berhasil mengislamkan Raja Tuban, Arya Dikara dan akhirnya menikahi puteri Raja Tuban tersebut (Ridin, 1999). Guru utama Raden Sahid adalah Sunan Bonang yang mengajarkan tentang ilmu '*sangkan paraning dumadi*'. Dalam ilmu ini terkandung beberapa filosofi hidup bagi manusia yaitu : dari mana asal usul manusia beserta fenomena alam yang terjadi, bagaimana kehidupan setelah mati, untuk apa manusia hidup dan apa itu hidup sejati (Ridin, 1999).

Sunan Kalijaga merupakan pembelajar yang sangat cepat. Beberapa ilmu yang dipelajarinya antara lain ilmu baca tulis (Arab dan Jawa), beladiri, ilmu syariat dan fiqh, bahasa arab dan ilmu politik. (Khafid, 2009). Setelah berhasil menguasai ilmu-ilmu tersebut dari gurunya, Sunan Kalijaga mewakafkan sebagian besar waktunya untuk berdakwah di

Cirebon. Hasilnya, masyarakat Cirebon banyak yang masuk Islam tanpa paksaan berkat kesungguhan dan keikhlasan Sunan dalam dakwahnya (Farida, 2015). Keberhasilan Sunan Kalijaga dalam menarik dukungan masyarakat ini akhirnya sampai terdengar Sultan Raden Fatah. Akhirnya Raden Fatah memanggilnya dan mengangkat Sunan Kalijaga sebagai pujangga dan penasehat kerajaan (Khafid, 2009).

Peranan Sunan Kalijaga sangat menonjol dalam pemerintahan Sultan Raden Fatah. Terutama dalam menundukan Empu Supo dan Adipati Terung yang merupakan dua pilar kerajaan Majapahit. Melalui pendekatan diplomasi, Sunan Kalijaga berhasil meluluhkan hati Adipati Terung untuk bergabung ke dalam kerajaan Demak. Hal ini mudah dilakukan karena Terung memang seorang Muslim sehingga dengan mudah diluluhkan hatinya. Berbeda dengan Empu Supo yang memiliki keyakinan kuat terhadap agama Hindu. Namun demikian, berkat kelihaiannya Sunan Kalijaga dalam berdiplomasi akhirnya beliau berhasil meyakinkan Empu Supo akan kebenaran ajaran Islam sehingga mau mengucapkan dua kalimat sahadat (Ridwan, 2007).

Peranan Sunan Kalijaga dalam kiprahnya membantu umara terjadi ketika awal berdirinya kerajaan Demak hingga kesultanan itu berakhir. Menurut berbagai sumber umur Sunan Kalijaga mencapai 100 tahun bahkan ada yang meyakini sampai 200 tahun. Selama hidupnya, Sunan Kalijaga mengabdikan pada kerajaan Demak dan kesultanan Pajang. Kemunculan kerajaan Pajang terjadi setelah melemahnya kerajaan Demak yang bermula dari perselisihan antara Arya Panangsang dan Jaka Tingkir atau Hadiwijaya (Sindonews, 2020). Perselisihan ini dimenangkan oleh Jaka Tingkir dan berdirilah kerajaan Pajang. Jaka tingkir dikenal memiliki kepribadian yang unggul dan ilmu yang luas karena berguru langsung kepada Sunan Kalijaga.

Peranan Sunan Kalijaga sebagai ulama sangat penting dalam menentukan corak pemerintahan dan politik pada masa itu. Bahkan selain ahli dalam masalah agama (faqih), Sunan Kalijaga juga ahli dalam tata kota (Bambang, 2000). Sehingga, setiap kota yang dibangun oleh Sultan dengan melibatkan Sunan Kalijaga pasti terdapat empat bangunan sebagai ciri khasnya yaitu : alun-alun, istana keraton, pohon beringin dan Masjid (Ummu, 2012).

Kolaborasi dakwah antara ulama dan umara masa Sunan Kalijaga adalah bahwa dakwah bukan semata menyeru masyarakat agar masuk namun ikut berperan aktif melakukan tindakan atau kebijakan yang secara praktis dapat melembutkan hati masyarakat seperti memenuhi kebutuhan publik. Pada masa itu, kebutuhan publik yang dinilai sangat penting adalah ketersediaan air baik untuk kebutuhan keluarga maupun irigasi pertanian. Sebabnya Demak menjadi wilayah yang kerap menghadapi musim kemarau. Penguasaan sumber daya air oleh Sultan yang di dukung oleh Sunan Kalijaga berhasil menarik simpati rakyat sehingga memiliki pengaruh besar bagi keberhasilan dakwah Islam di pulau Jawa. Dalam sejarah dakwah Rasulullah, penguasaan hajat hidup masyarakat seperti air ini dinilai sangat strategis bahkan menjadi kunci kemenangan Islam pada perang badar. Dengan dikuasainya daerah yang menjadi sumber air yaitu daerah Badar maka kafir Quraisy kehilangan akses mendapatkan kebutuhan air mereka (Sofwan, 1999).

Dengan demikian, kolaborasi ulama – umara masa Islam ini terjadi begitu ideal. Ketika kerajaan demak pertama kali di dirikan oleh Sultan

Fattah sekaligus menjadi raja pertamanya, beliau menempatkan para ulama sebagai penasehat utama baik dalam urusan pemerintahan maupun agama. Di antara tokoh-tokoh yang membantu Sultan Fatah tersebut adalah tiga sunan yaitu : sunan Kudus yang diangkat sebagai qadhi (hakim) yang bertugas memberikan keputusan hukum bagi masyarakat sesuai dengan hukum Islam, sunan giri diangkat sebagai mufti atau pemberi fatwa keagamaan bagi kerajaan dan masyarakat serta sunan Kalijaga sebagai anggota dewan penasehat. Lebih dari itu, Sultan Fatah bahkan memberikan akses seluas-luasnya bagi para ulama untuk menyebarkan Islam (Rahmat, 2015).

Kerjasama yang baik antara ulama dan umara ini secara efektif mampu menguatkan pondasi ekonomi masyarakat. Kondisi ini sangat kondusif untuk dilakukan islamisasi sebagai program selanjutnya. Perut yang kenyang dan hati yang tenang akan membuat dakwah Islam mudah diterima. Karena itu, pendekatan dakwah yang dilakukan dialogis, politik dan ekonomi oleh Sunan dan para Raja Islam Jawa ini penting untuk dijadikan rool model oleh umat Islam sepanjang zaman. Umara' tidak menjadikan agama sebagai kendaraan

politik kekuasaan tetapi kekuasaan itu digunakan untuk menguatkan potensi dakwah ditengah masyarakat.

3. Sunan Giri

Pada masa awal perkembangan Islam di Nusantara, ulama menyadari betul urgensi kekuasaan sebagai alat paling efektif untuk menyebarkan dan menerapkan Islam ditengah masyarakat. Oleh karena itu, diantara ulama tersebut ada yang tidak menjadi penasehat kerajaan semata tapi justru mendirikan kerajaan. Salah satunya adalah ulama yang bernama Sunan Giri sebagai salah satu tokoh penting penyebaran Islam di Jawa. Kiprahnya bukan semata menjadi ulama tetapi juga umara'.

Menurut situ wikipedia, Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442. Dia merupakan pendiri kerajaan Islam Giri Kedaton. Kerajaan ini berkedudukan di wilayah Gresik, Jawa Timur yang dijadikan sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa. Pengaruh kerajaan ini demikian luas dan berpengaruh hingga ke Madura, Lombok, Kalimantan, Maluku dan Sulawesi. Sunan Giri tercatat memiliki beragam nama panggilan yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Faqih, Raden 'Ainul Yaqin dan Joko

Samudro (wikipedia, 2020). Menurut Babat Gresik, Joko Samudero merupakan gelar yang diberikan oleh ibu angkatnya yang bernama Nyai Gede Pinatih (Anonim, 1990).

Ketika majapahit mengalami kemunduran dengan terpecahnya wilayah kekuasaan mereka menjadi kadipaten kecil, Raden Paku berjuang mempertahankan wilayahnya dengan cara memproklamirkan diri sebagai penguasa di wilayah tersebut dengan gelar Sunan Giri (Sunyoto, 2014). Dengan demikian, Sunan Giri menyandang dua posisi sekaligus yaitu ulama yang memiliki pengetahuan dan kesadaran agama yang dalam serta kekuasaan. Sementara raden paku merupakan julukan lain sunan giri yang memiliki makna sebagai pasaknya syiar Islam di Pulau Jawa.

Raden Paku muda awalnya berkeinginan untuk menuntut ilmu dan melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Namun keinginan itu tidak tercapai oleh suatu dan lain hal. Dalam perjalanannya, beliau hanya sampai di Pasai atau Melaka saja. Bersama pemuda Bonang, Raden paku berguru kepada ayah Raden Paku yaitu Maulana Ishak. Setelah itu, ayahnya menyuruh Raden Paku untuk kembali ke Pulau Jawa. Setiba di Jawa,

tepatnya di Gresik, di tanah berbukit itulah Raden Paku membangun Masjid dan pesantren sebagai pusat dakwah Islam sehingga ia dikenal sebagai Sunan Giri (Ismawati, 2012). Di pesantren ini pula pernah belajar dan menjadi murid Sunan Giri yaitu Sultan Ternate bernama Zainal Abidin yang memerintah tahun 1486-1500 (Graff, 1970).

Selain sebagai tokoh agama Islam yang berpengaruh, Sunan Giri juga merupakan tokoh politik yang sukses dengan bertindak sebagai umara' atau penguasa Islam yang menjadikan dakwah Islam sebagai misi utamanya. Kedudukan politis ini tampak dari gelar yang disandangnya yaitu prabu Satmata (Kasdi, 2008). Kontribusi besar yang diberikan Sunan Giri bagi dakwah adalah menyebarkan Islam dengan mengirimkan santri-santrinya ke berbagai pelosok nusantara untuk mengajarkan Islam, misalnya ke pulau Bawean, Ternate dan Madura. Posisinya sebagai ulama dan umara' sekaligus membuat Sunan Giri dikenal luas masyarakat bahkan melebihi ketenaran gurunya yaitu Maulana Ishak dan Sunan Ampel (Anita, 2014).

Urgensi Integrasi ulama dan Umara' di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dengan demikian, prinsip-prinsip ajaran Islam diyakini dan diamalkan dalam seluruh ranah kehidupan. Disinilah diperlukan adanya kolaborasi atau integrasi antara ulama dan umara' dalam mengokohkan nilai-nilai ajaran Islam di tengah kehidupan masyarakat muslim. Nasehat dan dakwah ulama seyogyanya didukung bahkan difasilitasi oleh umara'. Sebab umara' membutuhkan ulama untuk meligitasi program pembangunan dan sekaligus mendukung program pembangunan tersebut (Nasarudin, 2019).

Peran strategis ulama di tengah masyarakat tersebut mesti disadari seutuhnya oleh para ulama. Mengingat kemuliaan mereka tidak semata pada pengetahuan agamanya yang mumpuni namun sikap bagaimana sikap mereka terhadap dunia. Dukungan atau kritik ulama terhadap umara harus bersih dari motivasi duniawi. Disinilah pentingnya keteladanan ulama yang harus ditampilkan ditengah manusia. Sebaliknya, ketika ulama tidak memiliki integritas kepribadian yang baik bahkan terbawa arus materialisme yang rusak maka ulama akan kehilangan kewibawaannya ditengah umat dan umara'. Alhasil, keberadaan

mereka akan dipermainkan dan tidak akan dihormati.

Ulama mengemban tugas para nabi yaitu menyebarkan kebaikan Islam ditengah masyarakat. sementara kunci sukses keberhasilan Nabi Muhamad SAW terletak pada keberhasilan beliau dalam memberikan teladan bagi umatnya baik bagi umat yang miskin, kaya, berilmu, pebisnis, pejabat, petani dan sebagainya. Tugas Rasulullah sangat berat. Beliau mengawali gerak langkah masyarakat yang dipimpinnya dengan keteladanan. Itu merupakan kunci dari keberhasilan dakwah Rasulullah dan pengamalan ilmu agama (As Sya'rowi, 2007).

Tugas ulama berkaitan dengan umara' atau kepemimpinan negara dalam masyarakat setidaknya dapat dibagi menjadi dua : *pertama*, ulama yang tidak terlibat secara langsung sebagai pejabat struktural pemerintahan. *Kedua*, ulama yang terlibat dalam pemerintahan. Rincian kedua posisi ulama tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, ulama non struktural berperan sebagai pembina masyarakat baik melalui kegiatan keilmuan seperti majelis ta'lim atau pesantren. Melalui majelis ilmu yang mereka dirikan maka peran ulama sebagai pewaris Nabi yaitu menjaga agama dan masyarakat dari penyimpangan dan dekadensi moral dapat

dimaksimalkan. Mereka bukan saja mampu menggali hukum-hukum syariah tetapi juga berupaya maksimal agar ajaran Islam dapat difahami, diperjuangkan dan diterapkan ditengah-tengah umat. Selain itu, ulama non struktural ini juga memiliki kewajiban utama sebagai pengontrol kekuasaan dengan ilmu yang dimilikinya. Akan tetapi, peran ulama sebagai pengontrol kekuasaan ini berbeda dengan konsep oposisi dalam demokrasi.

Untuk itu, ulama harus memahami konstelasi politik global dan regional. Sehingga ulama bukan saja memahami dalil-dalil agama secara normatif akan tetapi mampu mengurai berbagai persoalan umat secara lebih objektif, argumentatif dan syar'i. Pendeknya, mereka tidak hanya sibuk pada urusan cabang atau ranting-ranting agama semata tetapi mamahami bagaimana mengkontekstualisasikan ajaran Islam sebagai solusi atas berbagai problem kehidupan masyarakat.

Kedua, ulama sebagai pejabat struktural pemerintahan. Dalam teori struktur pemerintahan Islam, seorang dapat menduduki jabatan tertentu apabila memiliki keluasan dan kedalaman ilmu-ilmu Islam. jabatan itu misalnya adalah qadhi (hakim/pengadilan). Posisi pengadilan dalam Islam sangat penting karena untuk memastikan tegaknya hukum

syara' (Manan, 2015). Mereka harus memiliki kapasitas ulama yang mampu menggali hukum-hukum Islam karena itu sarat lainnya juga mesti dipenuhi seperti baligh, berakal dan muslim (Toto, 2003).

Baik ulama struktural maupun non struktural keduanya memegang peranan penting bagi masyarakat. sehingga ilmu yang mereka miliki harus mampu secara aktif dimanfaatkan oleh masyarakat dan umara' demi kemaslahatan masyarakat. wajar bila dalam salah satu kesempatan Jusuf Kalla pernah berpesan bahwa hubungan ulama dan umara haruslah baik agar kehidupan tidak pincang (republika, 2017). Akan tetapi hubungan itu seyogyanya tidak diikat oleh kepentingan politik praktis atau duniawi tetapi hubungan itu dibangun diatas ridha Allah dengan mengikuti syariah-Nya.

KESIMPULAN

Kesuksesan dakwah Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran ulama dan umara pra kolonialisme. Hubungan antar ulama dan umara demikian intens sehingga kebijakan umara bukan hanya diwarnai oleh Islam tapi merepresentasikan kepentingan Islam yaitu penyebaran dakwah Islam. Kolaborasi ulama dan umara itu kemudian menghasilkan capaian perubahan peradaban di Nusantara secara fundamental.

Peradaban Nusantara yang sebelumnya bercorak Hindu-Budha dan animisme kemudian secara cepat berubah menjadi peradaban Islam. Kondisi ini terjadi tatkala kerajaan-kerajaan Islam pada masa itu dipimpin oleh umara yang peduli pada perkembangan dakwah Islam. Bahkan tidak sedikit diantara umara tersebut merupakan ulama. Wajar bila kebijakan yang dihasilkan berpatokan pada norma dan hukum Islam sebagai aturan bernegara, baik secara substantif maupun tekstual.

Relasi ulama dan umara' dengan studi kasusnya adalah Nuruddin ar Raniry mewakili Sumatera, Sunan Kalijaga dan Sunan Giri mewakili Jawa, terjadi hubungan yang integratif. Ulama tidak hanya diletakan pada posisi 'macan kertas' tetapi sebagai pengambil kebijakan baik sebagai qadhi maupun kepala pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rachmad, *Walisongo Gelora dakwah dan Jihad di Tanah Jawa 1404-1482 M*, Sukoharjo: al-Wafi, 2015
- Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2006
- Arnawati, Aar, *Kedudukan dan Peran Ulama dalam Al Qur'an*, Jurnal al Fath, Vol. 11 No. 01, Januari-Juni, 2017M. Quraisy Syihab, *Mmebumikan al-qur'an*, Bandung, Mizan, 1994

- Amin, Surahman, *Ilmu Dan Orang Berilmu Dalam Al-Qur'an: Makna Etimologis, Klasifikasi, Dan Tafsirnya*, Jurnal Empirisma, Vol. 24, No. 1 Januari 2005
- Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet ke 4, Jakarta, Amzah, 2014.
- Anita, Dewi Evi, 2014. *Walisongo: Mengislamkan Tanah Jawa, Suatu Kajian Pustaka*, Wahana Akademika, Vol. 1 No. 2
- Anonim, *Sistem Peradilan dalam Negara Khilafah*, dalam Tabloid Media Umat Edisi Oktober 2016
- Anonim, *Babad Gresik, Jilid I*, Alih tulisan dan Bahasa oleh Soekarman B.Sc, Gresik: Radya Pustaka Surakarta, 1990.
- As-Sya'rowi, M. Mutawalli, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Jakarta, GIP, 2007
- Bajuri, Muhamad, *Ulama, Petunjuk dan Penentu Kebaikan Umat*, dalam Jurnal Al Wa'i No 397, Tahun XXXIV, Shafar 1441 H./Oktober 2019 M
- Basri, Mui'nudinillah Dr, . M. MA, *Kebangkitan Ulama Pewaris Para Nabi*, dalam Majalah Sabili No 5 TH. XX 3 Januari 2013.
- Burhanudin, Jajat, *Ulamadan Kekuasaan: Pergumulan Elit Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta, Mizan, 2013
- Daudi, Ahmad, *Syekh Nurudin Ar Raniri*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.
- Farida, Umma, *Islamisasi di Demak Abad XV M: Kolaborasi Dinamis Ulama-Umara dalam Dakwah Islam di Demak*, AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Vol. 3, No. 2 Desember 2015
- Ghazali, Imam, *Ihza Ulumuddin*, Terj. Muh. Zuhri, Semarang, CV Asyifa', 2011.
- Gozali, *Hubungan Umara Dan Ulama Dalam Membentuk Kehidupan Sosio-Relijius Di Aceh Darussalam Masa Sultan Iskandar Muda*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16 No. 2, Juni 2016.
- Graff, H. J Dee, *South East Asian Islam to Eighhteenth Century*, Cambridge at The University Press, 1970.
- Gulen, M. Fethullah, *Dakwah*, Jakarta, Republika Penerbit, 2011.
- Hamka, *Tafsir al Azhar Jilid 7*, Jakarta, GIP, 2015.
- Hubky, Badrudin, *Dilema Ulama dalam Perubahan zaman*, Jakarta, GIP, 1995.
- Ismawati, *Ziarah Kubur dalam Perspektif Budaya dan Agama*, Jurnal At Taqaddum, Vol. 4 No. 1 tahun 2012.
- Kasdi, Aminudin, *Kepurbakalaan Sunan Giri*, Unesa University Press, 2008.
- Khafid, Muhammad, *Sejarah Demak Sultan Fatah dan Sunan Kalijaga*, Demak, Sukur, 2009.
- Madjid, Abdul, *Karakteristik Pemikiran Islam Nurudin Ar Raniri*, Substantia, Vol. 17, No. 2, Oktober 2015.
- Manan, Abdul, Prof. Dr. *etika hakim dalam penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta, Prenada Media, 2015.
- Mawardi, Imam, *Ahkam As Sulthaniah*, Jakarta, Qisthi Press, 2014.
- Musyaffa, *Pemikiran dan Gerakan Dakwah Syekh Nuruddin Ar Raniri*, Syiar, Vol. 18, No. 1, 2018.
- Penyusun, Tim, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta, PT Ikhtiar Baru, 2003.
- Pesantren, TIM Dakwah, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, Yogyakarta, PISS KTB, 2015.

- Raharjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al – Qur'an*, Jakarta: Paramadani, cet II, 2002.
- Romzi, Moh., *Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama*, Religio, Jurnal Studi Agama-agama, Volume 2, Nomor 1, Maret 2012.
- Said, Nurhidayat Muh. Dr. M.Ag, *Metode Penelitian Dakwah*, Makasar, Alaudin Press, 2013.
- Simom, Hasan, *Misteri Syeikh Siti Jenar*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Sulaymân, Abû Dâwud, *Sunan Abu Dawud Vol. 1*, Beirut, Dar al Fikr, 1998.
- Sulistiyono, Budi, *Walisongo dalam Pentas Sejarah Nusantara*, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id>, Mei 2014.
- Solihin, M, *Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunyoto, Agus, *Atlas Walisongo*, Depok, Pustaka IIMaN, 2014.
- Wahidin, Ade, *Konsep Ulama Menurut al Qur'an*, Al Tadabur, Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
- Wahyudi, Agus, *Makrifat Jawa; Makna Hidup Sejati Syeh Siti Jenar dan Walisongo*, Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2007.
- Wasit, Ridin Sofwan, dan Mundiri, *Islamisasi di Jawa: Walisongo Penyebar Islam di Jawa Menurut Penuturan Babad*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

